

Pelatihan Komunikasi Digital Etis Bagi Aparat Desa Di Kelurahan Korpri Jaya Dalam Penanganan Konflik Informasi Di Ruang Publik

Ethical Digital Communication Training for Village Apparatus in Korpri Jaya Village in Handling Information Conflicts in the Public Sphere

Lies Kumara Dewi*, Poppy Suryanti, Henny Dewi Laras Ati, Neysa Amallia

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

*Corresponding author: lieskumaradewi13@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah pola komunikasi sosial dan tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat kelurahan. Perubahan ini memunculkan tantangan baru berupa penyebaran informasi yang tidak etis, berpotensi memicu konflik sosial, serta menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan komunikasi digital pada aparat desa. Menyikapi kondisi tersebut, dilaksanakan pelatihan komunikasi digital etis bagi aparat Kelurahan Korpri Jaya, Kota Bandar Lampung. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi aparat dalam pengelolaan komunikasi publik yang sesuai etika digital serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa yang santun, informatif, dan inklusif di ruang digital. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi praktik komunikasi digital. Peserta dilibatkan dalam analisis kasus nyata terkait penyebaran informasi sensitif dan dilatih menyusun strategi penanganan konflik berbasis isu digital. Melalui rangkaian kegiatan ini, kemampuan aparat dalam memanfaatkan media digital secara bijak dan bertanggung jawab mengalami peningkatan yang signifikan. Aparat juga menjadi lebih memahami prinsip kebenaran, keadilan, dan kesopanan dalam komunikasi, sekaligus memperkuat koordinasi internal dalam pengelolaan kanal informasi resmi kelurahan. Dampak sosial yang terlihat antara lain meningkatnya keharmonisan hubungan antara aparat dan masyarakat, serta tumbuhnya budaya komunikasi yang terbuka, transparan, dan inklusif. Pelatihan ini tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Model pelatihan ini berpotensi untuk direplikasi di daerah lain dengan penyesuaian konteks lokal sebagai langkah strategis membangun pemerintahan yang etis, komunikatif, dan adaptif menghadapi tantangan era digital.

Kata Kunci: Komunikasi Digital, Konflik, Informasi, Aparat Desa

ABSTRACT

The rapid development of information technology has transformed patterns of social communication and governance, including at the village administration level. This shift has created new challenges, such as the spread of unethical information that may trigger social conflict, as well as limited digital communication skills among local government staff. In response to these issues, ethical digital communication training was conducted for the staff of Korpri Jaya Subdistrict, Bandar Lampung City. The training aimed to enhance their competence in managing public communication based on digital ethics and to raise awareness of the importance of using polite, informative, and inclusive language in online spaces. The training applied a participatory approach through outreach activities, interactive discussions, and practical simulations of digital communication. Participants were involved in analyzing real cases related to the spread of sensitive information and were trained to develop strategies for handling conflicts arising from digital issues. As a result, the staff showed significant improvement in their ability to use digital media wisely and responsibly, in accordance with principles of truthfulness, fairness, and proper conduct. Internal coordination within the subdistrict office also improved, particularly in managing official information channels. The social impact included enhanced harmony between staff and the community, along with the growth of a more open, transparent, and inclusive communication culture. The training not only strengthened individual capacities but also helped build public trust in more accountable and transparent local governance. This training model has the potential to be replicated in other regions with adjustments to local contexts as a strategic effort to build ethical, communicative, and adaptive governance in the digital era.

Keywords: Digital Communication, Conflict, Information, Village Officials

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan khususnya pada di tingkat lokal di daerah. Digitalisasi telah membuka ruang baru bagi aparat desa untuk berinteraksi lebih cepat, efisien, dan transparan dengan masyarakat. Dengan adanya berbagai platform digital seperti media sosial, aplikasi pesan singkat, dan laman informasi desa, komunikasi publik kini dapat menjangkau masyarakat secara luas. Kemajuan ini tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kemampuan komunikasi digital yang etis di kalangan aparatur pemerintahan desa (Suryanti & Apriadi, 2025).

Pada pemerintahan daerah khususnya di tingkat kelurahan dan desa, penggunaan media digital sering kali belum diimbangi dengan pemahaman tentang prinsip etika komunikasi publik. Banyak aparat desa yang memanfaatkan media sosial tanpa mempertimbangkan implikasi sosial maupun hukum dari pesan yang disampaikan (Dianah et al., 2024). Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Fenomena disinformasi dan misinformasi kini menjadi tantangan serius di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan pemerintahan desa. Informasi yang tidak terverifikasi kerap menyebar dengan cepat melalui media digital dan memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan maupun kinerja aparat desa. Apabila tidak direspons secara tepat, situasi tersebut dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan ketegangan sosial di ruang publik digital (Shaufiah et al., 2025).

Kelurahan Korpri Jaya sebagai salah satu wilayah administratif di Kota Bandar Lampung menghadapi dinamika serupa. Perkembangan arus informasi yang begitu cepat di kawasan ini menuntut aparatur kelurahan untuk mampu beradaptasi dengan pola komunikasi digital yang efektif dan beretika (Nursetiawan et al., 2024). Beberapa kasus perbedaan persepsi di masyarakat setempat bahkan dipicu oleh kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi publik melalui media digital. Hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas komunikasi digital bagi aparat kelurahan. Faktor kemampuan teknis, aspek etika komunikasi digital juga menjadi isu penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Etika digital menuntut aparat desa untuk berhati-hati dalam memilih kata, menyampaikan opini, dan merespons aspirasi publik di dunia maya (SIREGAR, 2022). Kesalahan kecil dalam berkomunikasi di ruang digital dapat menimbulkan persepsi negatif yang berimplikasi luas, terutama ketika menyangkut isu pelayanan publik dan kebijakan desa. Dari hal tersebut penyelenggaraan pelatihan komunikasi digital etis menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintahan di tingkat akar rumput (Hidayah & Sholihah, 2025).

Aparat desa sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran strategis dalam membangun citra positif pemerintahan daerah. Dalam era keterbukaan informasi, setiap tindakan dan pernyataan yang disampaikan aparat di ruang publik digital akan direkam, disebar, dan ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat. Situasi ini menuntut adanya kemampuan komunikasi yang bukan hanya informatif, tetapi juga persuasif, empatik, dan sesuai dengan norma-norma sosial serta hukum yang berlaku (FAHREZA, 2024).

Realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparat desa masih menjadikan media sosial sekadar sarana hiburan atau promosi kegiatan tanpa memahami potensi konflik yang bisa muncul dari interaksi daring. Minimnya pemahaman tentang tata kelola informasi publik dan etika digital menyebabkan munculnya miskomunikasi antara pemerintah desa dan warganya (SJAFRIZAL & Muhamad, 2025). Kondisi ini berisiko menciptakan polarisasi di tingkat komunitas, apalagi ketika informasi yang beredar tidak melalui proses klarifikasi yang memadai. Penguatan kapasitas komunikasi digital etis menjadi langkah strategis untuk menciptakan ruang dialog publik yang sehat. Pelatihan yang dirancang secara partisipatif dapat membantu aparat desa memahami batasan, tanggung jawab, dan peluang yang ada dalam berkomunikasi melalui media digital. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut, aparat desa dapat menjalankan fungsi komunikatifnya dengan lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif (Basai & Gilang, 2025).

Komunikasi digital etis juga berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Informasi yang disampaikan secara benar, terbuka, dan sopan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. Sebaliknya, kesalahan komunikasi dapat merusak reputasi kelembagaan dan memperkeruh hubungan antara pemerintah dan warga. Literasi digital perlu menjadi bagian dari pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa secara berkelanjutan. Dalam tataran praktis, pelatihan komunikasi digital etis dapat mencakup aspek teknis seperti penulisan pesan publik, klarifikasi isu di media sosial, serta manajemen komentar atau respon publik secara profesional. Melalui pelatihan ini, aparat desa diharapkan mampu mengenali potensi konflik informasi dan memiliki strategi untuk menanganinya sebelum meluas. Pendekatan edukatif yang digunakan perlu menekankan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) agar peserta dapat menginternalisasi nilai-nilai etika digital dalam keseharian mereka.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Korpri Jaya juga menjadi bentuk sinergi antara akademisi dan pemerintah lokal dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbentuk pola komunikasi baru yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pelatihan yang bersifat partisipatif akan memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial melalui komunikasi yang santun dan beretika. Penguatan kapasitas komunikasi digital etis bukan hanya soal peningkatan kompetensi individu, tetapi juga transformasi budaya organisasi di lingkungan pemerintahan desa. Aparat kelurahan perlu membangun budaya komunikasi internal yang terbuka, saling menghormati, dan berbasis data. Setiap informasi yang keluar ke ruang publik akan mencerminkan profesionalisme serta integritas kelembagaan. Kegiatan pelatihan ini menjadi respon nyata terhadap meningkatnya kebutuhan aparatur pemerintahan lokal untuk beradaptasi dengan kebijakan nasional terkait digitalisasi pelayanan publik. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong aparatur di seluruh tingkatan untuk memahami etika dan tata kelola komunikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa isu literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi setiap penyelenggara pemerintahan (Dewi et al., 2022).

Dilihat dari aspek sosial keberhasilan pelatihan komunikasi digital etis diharapkan dapat memberikan dampak berantai pada masyarakat luas. Aparat desa yang terampil dan beretika dalam menyampaikan informasi akan menjadi teladan bagi warga dalam menggunakan media digital secara bijak. Dengan terciptanya ekosistem komunikasi publik yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai perdamaian sosial. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan aktual di Kelurahan Korpri Jaya. Melalui pelatihan komunikasi digital etis bagi aparat desa, diharapkan terbentuk kesadaran baru akan pentingnya tanggung jawab komunikasi di ruang digital sebagai instrumen pencegahan konflik informasi. Upaya ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik di era digital serta membangun pemerintahan yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Permasalahan utama yang dihadapi yaitu aparat Kelurahan Korpri Jaya, terletak pada rendahnya pemahaman terhadap etika komunikasi digital dalam konteks pelayanan publik. Banyak aparat yang telah menggunakan media sosial dan platform digital lainnya sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, namun belum sepenuhnya memahami kaidah komunikasi publik yang baik dan benar. Akibatnya, sering terjadi miskomunikasi dan perbedaan persepsi antara pihak pemerintah dan warga, terutama dalam menanggapi isu-isu yang sensitif di ruang publik digital. Belum adanya pedoman internal yang mengatur tata cara komunikasi digital bagi aparat kelurahan menyebabkan pola penyampaian informasi bersifat individual dan tidak terkoordinasi. Masing-masing aparat kerap menggunakan gaya komunikasi berbeda tanpa memperhatikan standar etika dan bahasa yang mencerminkan identitas kelembagaan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi pesan publik, bahkan dapat menciptakan ketegangan sosial ketika informasi yang beredar tidak sesuai dengan persepsi masyarakat (Sopyan et al., 2025).

Permasalahan lain yang juga muncul adalah lemahnya kemampuan aparat dalam mengelola konflik informasi yang terjadi di dunia maya. Dalam era keterbukaan informasi, isu atau komentar negatif di media sosial dapat dengan cepat memicu perdebatan yang tidak produktif. Aparat sering kali belum memiliki strategi yang tepat untuk merespons situasi semacam ini, sehingga persoalan kecil dapat berkembang menjadi konflik yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah kelurahan. Fenomena ini menandakan perlunya penguatan kapasitas komunikasi yang berbasis pada prinsip etika, empati, dan profesionalisme. Bermula dari kondisi tersebut, tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kompetensi aparat Kelurahan Korpri Jaya dalam berkomunikasi secara digital dengan memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab sosial. Melalui kegiatan pelatihan yang interaktif dan aplikatif, aparat diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip komunikasi publik yang efektif, serta mengimplementasikannya dalam penyampaian informasi melalui berbagai platform digital. Aparat dapat menjadi agen penyebar informasi yang kredibel dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial di lingkungan masyarakat.

Tujuan pengabdian ini juga mencakup upaya membangun budaya komunikasi kelembagaan yang beretika, terbuka, dan konsisten. Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya kesadaran kolektif di antara aparat kelurahan tentang pentingnya tanggung jawab moral dalam mengelola informasi publik. Pada akhirnya, kegiatan ini bertujuan menciptakan model komunikasi digital etis yang dapat direplikasi di tingkat pemerintahan desa lainnya sebagai bentuk kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan harmonis di era digital.

BAHAN DAN METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang dihadapi aparat Kelurahan Korpri Jaya dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan *Participatory Learning and Action* (PLA) yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih agar aparat tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga berperan sebagai subjek yang berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah komunikasi digital dan menemukan solusi praktis yang relevan dengan kondisi lokal mereka (Astna et al., 2025).

Tahapan awal kegiatan diawali dengan observasi lapangan dan identifikasi kebutuhan. Tim pelaksana melakukan wawancara dan diskusi dengan pihak kelurahan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik komunikasi yang selama ini dilakukan. Melalui kegiatan ini, diperoleh informasi tentang bagaimana aparat memanfaatkan media sosial, jenis pesan yang disampaikan kepada masyarakat, serta permasalahan yang sering muncul akibat penyebaran informasi yang tidak tepat. Data hasil observasi ini menjadi dasar penyusunan modul pelatihan yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Korpri Jaya (Isnawati et al., 2022). Tahap selanjutnya adalah penyusunan materi dan desain pelatihan. Materi dikembangkan dengan mengintegrasikan konsep literasi digital, etika komunikasi publik, serta manajemen konflik informasi. Setiap topik dirancang agar mudah dipahami dan aplikatif bagi aparat desa yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Modul pelatihan mencakup panduan komunikasi digital etis, strategi klarifikasi informasi di media sosial, serta contoh-contoh kasus konflik informasi yang relevan dengan realitas di lapangan (Agusman et al., 2023).

Kegiatan inti berupa pelatihan tatap muka interaktif yang dilaksanakan di aula Kelurahan Korpri Jaya. Kegiatan ini diikuti oleh aparat kelurahan, perangkat RT/RW, serta perwakilan lembaga masyarakat. Pelatihan disusun dalam bentuk sesi paparan materi, studi kasus, dan simulasi praktik komunikasi digital. Dalam sesi simulasi, peserta diminta untuk mempraktikkan penyusunan pesan publik yang sesuai dengan etika digital serta menanggapi komentar atau kritik masyarakat di media sosial dengan pendekatan komunikatif dan profesional. Selain dengan tatap muka dilakukan pula pendampingan lanjutan (mentoring) untuk memastikan

penerapan materi dalam kegiatan komunikasi sehari-hari. Tim pengabdian mendampingi aparat dalam mengelola akun media sosial resmi kelurahan serta memberikan umpan balik terhadap setiap bentuk interaksi digital yang dilakukan. Pendampingan ini bertujuan memperkuat kemampuan reflektif peserta dalam mengevaluasi praktik komunikasi mereka, sekaligus menanamkan kebiasaan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima atau disebarkan (Trisna & Batubara, 2025).

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelatihan dengan mengamati partisipasi peserta dan kemampuan mereka dalam memahami materi. Sementara evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir dengan menggunakan instrumen kuesioner dan wawancara. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip komunikasi digital etis serta perubahan perilaku dalam menyampaikan informasi publik secara lebih berhati-hati dan profesional. Untuk menjamin keberlanjutan program, kegiatan ini juga menghasilkan rancangan pedoman etika komunikasi digital bagi aparat Kelurahan Korpri Jaya. Dokumen ini disusun secara kolaboratif antara tim pengabdian dan peserta pelatihan sebagai panduan dalam mengelola informasi publik di ruang digital. Pedoman tersebut memuat tata cara penyusunan pesan publik, penggunaan bahasa yang sopan, klarifikasi berita hoaks, serta mekanisme tanggapan terhadap aduan masyarakat di media sosial.

Seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran kolektif aparat terhadap pentingnya komunikasi digital etis dalam mencegah konflik informasi. Kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis aparatur kelurahan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan profesionalisme dalam komunikasi publik. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain dalam rangka memperkuat tata kelola komunikasi pemerintahan yang adaptif terhadap era digital dan sensitif terhadap potensi konflik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan komunikasi digital etis bagi aparat Kelurahan Korpri Jaya telah terlaksana dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Sebanyak 25 orang aparat kelurahan, termasuk kepala seksi, staf administrasi, dan perangkat RT/RW, mengikuti kegiatan secara penuh. Keterlibatan peserta menunjukkan antusiasme tinggi terhadap tema pelatihan yang dianggap relevan dengan tantangan komunikasi publik di era digital. Kehadiran peserta di setiap sesi pelatihan mencapai lebih dari 90%, yang menandakan keberhasilan pendekatan partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini. Pada berjalannya proses pelatihan, peserta menunjukkan respon positif terhadap metode pembelajaran yang interaktif. Diskusi kelompok dan simulasi praktik dianggap membantu mereka memahami secara konkret bagaimana etika komunikasi digital diterapkan dalam konteks pelayanan publik. Peserta mengakui bahwa sebelumnya banyak di antara mereka belum menyadari pentingnya pemilahan informasi dan keakuratan sumber sebelum disebarkan kepada masyarakat. Hasil observasi menunjukkan adanya perubahan sikap ke arah yang lebih hati-hati dalam berkomunikasi di ruang digital.

Capaian lain yang menonjol adalah meningkatnya kesadaran aparat terhadap tanggung jawab moral sebagai penyampai informasi publik. Dalam sesi refleksi, para peserta menegaskan perlunya kehati-hatian dalam merespons komentar warga di media sosial. Mereka menyadari bahwa tanggapan yang emosional atau tidak proporsional dapat memperburuk situasi dan menurunkan kredibilitas lembaga. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya membangun keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat nilai etika dalam proses komunikasi pemerintahan.

Hasil pengukuran melalui kuesioner pra dan pasca pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pemahaman konsep komunikasi digital etis. Sebelum pelatihan, hanya 36% peserta yang mampu mendefinisikan prinsip komunikasi etis dengan benar, sementara setelah pelatihan angka tersebut meningkat menjadi 84%. Selain itu, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi potensi konflik informasi di media digital juga mengalami peningkatan dari 42% menjadi 81%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan

literasi digital aparat kelurahan secara nyata. Peningkatan kompetensi terlihat dalam kemampuan peserta menyusun pesan publik yang informatif dan santun. Melalui latihan penyusunan konten digital, peserta dapat mempraktikkan cara menulis pesan resmi kelurahan dengan bahasa yang jelas, netral, dan tidak menimbulkan bias. Salah satu hasil konkret kegiatan ini adalah terbentuknya *draft* pedoman komunikasi digital Kelurahan Korpri Jaya, yang dirancang sebagai panduan internal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan grup komunikasi resmi.

Komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga pada kesadaran etis komunikator terhadap konteks sosial dan budaya penerima pesan. Prinsip ini tampak jelas dalam perubahan perilaku aparat setelah pelatihan, di mana mereka lebih memperhatikan waktu, nada, dan bentuk penyampaian pesan publik. Peningkatan kompetensi komunikasi digital etis tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan konatif. Pelatihan ini juga berimplikasi pada peningkatan kapasitas aparat dalam mengelola potensi konflik informasi di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara tindak lanjut, para peserta mengaku lebih siap menghadapi situasi ketika isu sensitif muncul di media sosial. Mereka memahami pentingnya klarifikasi dan komunikasi dua arah sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan.

Dampak sosial yang terlihat setelah pelatihan cukup signifikan. Aparat mulai menerapkan prinsip komunikasi etis dalam interaksi digital, baik dalam grup *WhatsApp* masyarakat maupun media sosial resmi kelurahan. Beberapa peserta bahkan menjadi inisiator dalam menyusun mekanisme verifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Tindakan ini mencerminkan munculnya budaya komunikasi baru yang lebih bertanggung jawab dan transparan di lingkungan pemerintahan lokal. Keberhasilan pelatihan ini tidak terlepas dari strategi penyampaian materi yang kontekstual dan berbasis pengalaman peserta. Simulasi kasus yang diambil dari realitas lokal membantu peserta memahami konsekuensi langsung dari kesalahan komunikasi digital. Pendekatan ini memungkinkan mereka melihat hubungan antara teori dan praktik secara konkret, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Evaluasi akhir menunjukkan bahwa 92% peserta merasa pelatihan ini memberikan dampak positif terhadap kinerja komunikasi mereka di lingkungan kerja.

Dampak individual dari kegiatan ini juga memperkuat koordinasi internal antar aparat kelurahan. Melalui sesi kolaboratif, peserta menyepakati perlunya pembentukan tim pengelola komunikasi publik digital yang bertugas memantau arus informasi dan menanggapi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Inisiatif ini menandai langkah awal menuju pembentukan sistem komunikasi publik yang terstruktur dan terintegrasi di tingkat kelurahan. Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada pencegahan konflik sosial. Melalui komunikasi digital yang etis, pemerintah kelurahan dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam menjaga kestabilan sosial di ruang publik. Pelatihan ini bukan sekadar peningkatan kompetensi individu, tetapi juga upaya strategis dalam memperkuat tata kelola komunikasi pemerintahan di era digital.

Capaian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi dan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks. Pengalaman dari kegiatan ini dapat dijadikan model pengabdian berkelanjutan untuk wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa dalam manajemen komunikasi publik dan pencegahan konflik informasi.

Pelaksanaan pelatihan komunikasi digital etis di Kelurahan Korpri Jaya memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap pola interaksi antara aparat dan masyarakat. Saat berjalannya kegiatan teridentifikasi perubahan dalam cara aparat berkomunikasi di ruang digital, khususnya dalam penggunaan bahasa yang lebih sopan, netral, dan menghindari konotasi negatif. Perubahan ini secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kelurahan sebagai lembaga yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Dampak nyata yang muncul adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kanal komunikasi resmi kelurahan. Jika sebelumnya warga cenderung pasif atau enggan memberikan tanggapan, pasca pelatihan, masyarakat menjadi lebih aktif memberikan masukan melalui media sosial kelurahan. Respons positif ini muncul karena masyarakat merasa dihargai dan diakomodasi secara etis oleh aparat yang kini lebih komunikatif dan terbuka dalam menyampaikan informasi publik. Pelatihan ini berkontribusi terhadap terbentuknya budaya komunikasi baru di lingkungan pemerintahan lokal. Aparat yang sebelumnya hanya berfokus pada penyampaian informasi kini lebih memperhatikan aspek dialog dan keterlibatan publik. Diskusi antara aparat dan warga di platform digital kini berlangsung lebih produktif, berorientasi pada solusi, dan minim gesekan emosional. Kondisi ini mencerminkan terbentuknya ekosistem komunikasi publik yang lebih sehat.

Perspektif sosial mengalami perubahan ini memiliki implikasi yang lebih luas terhadap keharmonisan masyarakat. Informasi yang disebarkan oleh kelurahan kini menjadi sumber rujukan utama bagi warga dalam memahami kebijakan dan kegiatan pemerintahan. Hal ini menekan penyebaran isu liar dan hoaks yang sebelumnya sering muncul di grup komunitas lokal. Dengan adanya kanal informasi resmi yang dikelola secara etis, masyarakat menjadi lebih teredukasi dan memiliki sumber informasi yang dapat dipercaya.

Melalui praktik komunikasi yang transparan, pemerintah kelurahan berhasil memperkuat kepercayaan sosial (*social trust*) yang menjadi modal penting bagi stabilitas sosial. Selain membangun kepercayaan publik, dampak sosial lain yang menonjol adalah meningkatnya solidaritas antar aparat dalam mengelola komunikasi publik. Sebelumnya, setiap staf memiliki gaya komunikasi sendiri-sendiri; kini mereka menerapkan pola koordinasi dan saling memeriksa pesan sebelum dipublikasikan. Langkah ini menciptakan sistem kontrol sosial internal yang efektif untuk mencegah kesalahan informasi dan memelihara konsistensi citra kelembagaan di mata masyarakat.

Pelatihan ini mendorong terciptanya perilaku komunikasi yang berorientasi pada penyelesaian konflik. Aparat menjadi lebih mampu mengenali potensi konflik yang muncul dari perbedaan persepsi dan menanganinya dengan pendekatan persuasif. Dalam beberapa kasus, ketika terjadi perdebatan di grup warga, aparat berhasil memediasi situasi dengan memberikan klarifikasi berbasis data dan bahasa yang menenangkan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi etis berdampak langsung pada ketertiban sosial di tingkat lokal. Dampak positif lainnya adalah tumbuhnya kesadaran literasi digital di kalangan masyarakat sekitar. Dengan contoh dari aparat yang komunikatif dan berhati-hati dalam menyebarkan informasi, warga mulai meniru perilaku serupa. Mereka menjadi lebih selektif dalam membagikan berita dan lebih sering melakukan verifikasi sebelum menyebarkannya. Fenomena ini menandakan munculnya perubahan perilaku komunikasi masyarakat menuju budaya digital yang lebih bertanggung jawab.

Pada aspek kelembagaan terlaksananya pelatihan ini memperkuat citra Kelurahan Korpri Jaya sebagai entitas pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Penerapan prinsip komunikasi digital etis menjadi nilai tambah bagi kelurahan dalam membangun relasi sosial yang harmonis dengan warganya. Keberhasilan ini bahkan menjadi referensi bagi kelurahan lain di wilayah Kota Bandar Lampung yang mulai mengadopsi model pelatihan serupa untuk meningkatkan kapasitas komunikasinya. Secara psikososial kegiatan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan aparat kelurahan. Perangkat kelurahan dan desa kini merasa lebih siap menghadapi kritik atau pertanyaan publik di ruang digital tanpa rasa takut atau canggung. Sikap positif ini memperlihatkan bahwa pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengubah pola pikir aparat tentang pentingnya komunikasi sebagai sarana membangun hubungan sosial yang produktif.

Keberlanjutan dampak sosial pelatihan ini berpotensi meluas ke bidang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Etika digital yang telah ditanamkan diharapkan menjadi dasar dalam setiap bentuk komunikasi publik, baik terkait pelayanan administrasi, pengumuman kebijakan, maupun penyampaian program sosial. Hasil pelatihan yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi digital aparat Kelurahan Korpri Jaya mengalami peningkatan signifikan, terutama dalam hal kesadaran etika berinteraksi di ruang publik. Aparat yang telah mengikuti pelatihan menunjukkan perubahan sikap dalam merespons isu publik, dari sebelumnya reaktif menjadi lebih reflektif dan komunikatif.

Aparat mulai memahami bahwa setiap pesan yang disampaikan memiliki konsekuensi sosial dan politik, terutama ketika melibatkan isu-isu publik. Pelatihan ini juga berhasil menciptakan perubahan paradigma di kalangan aparat, di mana komunikasi digital kini tidak lagi dianggap sekadar media penyampaian informasi, melainkan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Paradigma baru ini mendorong munculnya praktik komunikasi yang berbasis pada prinsip keterbukaan, partisipasi, dan kejujuran. Aparat memahami bahwa etika komunikasi adalah fondasi utama dalam membangun legitimasi sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal.

Peningkatan kompetensi peserta terlihat pada kemampuan mereka dalam mengelola konten digital secara profesional. Aparat mampu membuat narasi yang informatif, berimbang, dan tidak memicu polemik. Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi digital etis dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik informasi (*preventive communication mechanism*). Dengan kemampuan tersebut, potensi kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah dapat diminimalisasi secara signifikan.

Perspektif sosial menunjukkan bahwa kegiatan ini membuktikan komunikasi digital etis dapat menjadi sarana efektif dalam mencegah polarisasi masyarakat. Selain dampak sosial terdapat dampak kognitif yang teridentifikasi dalam bentuk peningkatan kemampuan kritis aparat terhadap informasi digital. Mereka kini lebih cermat dalam menilai sumber informasi dan mampu membedakan antara opini pribadi dan fakta publik. Sikap kritis ini merupakan indikator penting dari keberhasilan pelatihan, karena menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mampu berkomunikasi secara etis, tetapi juga berpikir analitis dalam mengelola isu-isu sosial di ruang publik.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pelatihan komunikasi digital etis dapat menjadi model intervensi sosial yang efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola komunikasi publik di tingkat kelurahan. Integrasi antara aspek teknis, etis, dan sosial yang diajarkan selama pelatihan membentuk ekosistem komunikasi yang lebih berdaya guna dalam mencegah konflik informasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan keterampilan, tetapi juga membangun pondasi jangka panjang bagi transformasi budaya komunikasi pemerintahan lokal di era digital.

KESIMPULAN

Pelatihan komunikasi digital etis di Kelurahan Korpri Jaya terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola komunikasi publik secara bijak, transparan, dan beretika. Melalui pendekatan partisipatif dan praktik langsung, aparat tidak hanya memperoleh literasi digital, tetapi juga pemahaman moral yang memperkuat kemampuan mereka dalam menangani misinformasi, mencegah konflik informasi, serta menjaga kualitas interaksi dengan masyarakat. Dampak kegiatan ini terlihat dari meningkatnya kepercayaan publik, terciptanya budaya komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis, serta membaiknya koordinasi internal dalam pengelolaan pesan resmi. Temuan ini menegaskan bahwa etika digital harus menjadi bagian integral dari kebijakan komunikasi pemerintah lokal, dan model pelatihan serupa layak direplikasi sebagai strategi membangun tata kelola pemerintahan modern yang inklusif, profesional, dan responsif terhadap tantangan era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y., Yasir, A., Asrun, L., & Alauddin, M. R. S. (2023). Peningkatan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Tirawuta Kecamatan Tirawuta Provinsi Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal Of Community Services*, 2(1), 25–30.
- Astna, M., Trisiana, A., & Azizah, N. (2025). Literasi Digital Dalam Mendukung Digital Society Menuju Desa Cerdas Melalui Pendidikan Karakter Pada Karang Taruna Desa Mlese. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 6(2), 719–735.
- Basai, E. P., & Gilang, M. H. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Objek Wisata Pantai Di Desa Kiluan Negeri Tanggamus). *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (Jshs)*, 10(1).
- Dewi, A. S., Gilang, M. H., Riyadi, S., Pujiati, A., & Maulina, Y. (2022). Penyuluhan Tentang Financial Technology Di Desa Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(3), 751–756.
- Dianah, L., Luthfi, M. C., Denni, I., & Bhakti, D. D. (2024). Keterampilan Digital Masyarakat Desa Sindangsuka Garut. *Badranaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(01), 14–22.
- Fahreza, I. P. (2024). *Peran Kader Digital Dalam Pelaksanaan Program Smart Village Di Desa Koto Masjid Kecamatan Xiii Koto Kampar, Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hidayah, I. A., & Sholihah, L. (2025). *Peran Diskominsa Aceh Dalam Penertiban Etika Bermedia Sosial Untuk Mewujudkan Partisipasi Politik Sehat Di Provinsi Aceh*. Ipdn.
- Isnawati, S. I., Bangsa, J. R., & Aziz, A. (2022). Strategi Komunikasi Bisnis Di Era Digital Sebagai Upaya Mengembangkan Potensi Desa Tambakroto, Pekalongan. *Surya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 46–54.
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Anwar, A. N. R., Sujai, I., & Firmanto, C. (2024). Pelatihan Digital Leadership Bagi Perangkat Desa Di Desa Pamokolan Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. *Mallomo: Journal Of Community Service*, 4(2), 351–360.
- Roeva, O. (2012). Real-World Applications of Genetic Algorithm. In *International Conference on Chemical and Material Engineering* (pp. 25–30). Semarang, Indonesia: Department of Chemical Engineering, Diponegoro University.
- Shaufiah, S., Kristinawati, D., Rochmawati, R., Rizal, M. F., Sukawati, R., & Fauziah, H. (2025). Mewujudkan Masyarakat Desa Yang Cerdas Digital: Edukasi Etika Dan Keamanan Digital Di Pamupukan, Kuningan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(1), 27–33.
- Siregar, H. D. (2022). *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2020 Berdasarkan Permenpan Dan Rb Nomor 30 Tahun 2011*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
- Sjafrizal, T., & Muhamad, P. (2025). Sosialisasi Manajemen Komunikasi Digital Dalam Pelatihan Program Pelayanan Masyarakat Pada Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Desa Talagasari Kecamatan Serangpanjang Subang. *Krida Cendekia*, 3(03).
- Sopyan, E., Prasetio, Y. D., Apriadi, E. A., & Chairunnisa, C. (2025). Desa Digital Dan Informatif: Visualisasi Dan Manajemen Konten Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Di Pemerintahan Desa Kunjir Lampung Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams)*, 6(01), 61–75.
- Suryanti, P., & Apriadi, E. A. (2025). Kecerdasan Buatan Dalam Produksi Konten Jurnalistik: Analisis Etika Dan Akurasi Komunikasi Berita Berbasis Ai. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 253–263.

Trisna, N. F. I. E., & Batubara, A. K. (2025). Literasi Digital Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(2), 455–465.